

BUMN MILIK SIAPA?

KEBIJAKAN PRIVATISASI PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JUSUF KALLA (2004-2009)

Fajar Trilaksono dan Faris Al Fadhat

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This paper describes privatization in Indonesia from the era of President Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri to the government of Susilo Bambang Yudhoyono. In addition, privatization is part of neoliberalism, namely the economic policy program from the agreement made by the IMF and World Bank to save the economy of a country and become a condition of assistance from the IMF to a country experiencing a crisis, privatization in Indonesia is closely related to political economic intervention The IMF because Indonesia came to this international organization when the crisis hit Indonesia. The most privatized BUMN was carried out by President Susilo Bambang Yudhoyono on the grounds to strengthen the economy and accelerate debt payments to the IMF, supported by people in the Sby cabinet who relied on privatization. The theoretical framework of this paper uses the theory of neoliberalism.

Keywords: Privatization, Neoliberal, president, crisis, investment, policy, government, economy, foreign, Foreign, debt, law, Indonesia

Latar belakang

Krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan agustus 1998 sebenarnya sudah ada tanda-tanda penyebab sebelumnya. Hal ini dapat dilihat baik secara eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal penyebabnya adalah rentannya Indonesia dari pengaruh ekonomi di Asia. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang dialami Indonesia dipengaruhi oleh negara Asia yaitu krisis mata uang yang terjadi di Thailand. Dengan melihat rentannya Indonesia terhadap hal tersebut sebenarnya dapat diperkirakan akan melanda beberapa negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Sedangkan dari sisi internal penyebab krisis ekonomi adalah yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan penurunan pendapatan per kapita yang dimana pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia -13 persen.¹ Sentralisasi kekuasaan, seperti penguasaan ekonomi oleh elit penguasa seperti industrialisasi, korupsi, kolusi.

Untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia, *International Monetary Fund* (IMF) di undang masuk ke Indonesia. IMF memiliki dasar kebijakan yang selalu menjadi syarat ketika ingin diberikannya bantuan. Kebijakan tersebut yang pertama adalah *strucural adjustment policy*. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi masalah darurat neraca pembayaran. Masalah darurat yang dimaksud adalah terjadinya defisit transaksi berjalan seperti yang dialami Indonesia paa tahun 1997, yaitu defisit transaksi berjalan yang menahun dan turunnya nilai mata uang secara drastis. Kebijakan yang kedua adalah restrukturisasi atau penataan kembali perekonomian yang beraliran neoliberal. Kebijakan ini berisi kebijakan deregulasi yang mendukung ekonomi pasar secara luas.²

Kebijakan ekonomi dari IMF berdampak langsung terhadap perubahan masyarakat di Indonesia baik positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan adanya dua pandangan terhadap teori ketergantungan yang telah dijelaskan oleh Sztompka, yaitu pandangan yang bersifat pesimis dan pandangan yang bersifat optimis. Gejala perubahan sosial yang timbul sebagai akibat dari kedua teori ketergantungan tersebut dapat dilihat dari bidang politik dan ekonomi yang di dalamnya mencakup salah satu program yang dipaksakan oleh IMF kepada Indonesia yaitu program privatisasi. Sistem ini menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya terbatas pada pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Privatisasi menerangkan bahwa jika sektor publik dibebaskan dalam melakukan usaha, investasi dan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Namun pada kenyataannya privatisasi merupakan cara IMF untuk melemahkan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dengan cara menjual aset-aset negara tersebut. Cara lainnya adalah dengan mengurangi bahkan mencabut sama sekali subsidi baik pada BBM, listrik, pendidikan, sampai kesehatan. Alasan yang banyak digunakan pemerintah sebagai alasan pemerintah atas dijualnya BUMN adalah karena tidak efisien dan terjadi kebocoran-kebocoran dalam sebuah BUMN sehingga perlu untuk di privatisasi.³

Di era pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, IMF sempat menunda dana bantuan karena terjadi kekerasan militer di Timor Leste, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁴ Selama Habibie menjabat menjadi presiden banyak tekanan dari dalam negeri, Habibie juga harus berhadapan dengan intervensi ekonomi yang dipaksakan oleh IMF. Lembaga moneter ini memaksa Indonesia agar

¹ Okezone. 2018. "Boediono Mengenang Krisis Ekonomi 1998: Kita Paling parah Saat Itu." 28 Maret. Tersedia Online Melalui: <https://economy.okezone.com/read/2018/03/28/20/1879132/boediono-mengenang-krisis-ekonomi-1998-kita-paling-parah-saat-itu>, diakses 21 Oktober 2018.

² Revrisond Baswir, Deddy Heriyanto dan Rinto Andriyono, 2003. *Terjajah Di Negeri Sendiri*. Jakarta: Elsam. hlm 415.

³ Siti Khadijah. 2014. "IMF Dalam Perspektif Teori Dependensi dan Perubahan Sosial". *Jurnal Makna*. Vol 4.No. 1. hal 13-14.

⁴ Lavinda. 2018. "Memorabilia IMF dari era Soeharto hingga Jokowi." *CNN Indonesia*, 5 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181001180924-532-334733/memorabilia-imf-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>, diakses 28 Oktober 2018.

menghapus kebijakan subsidi, terutama BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik). Namun, hal itu justru ditolak, dengan begitu Habibie pun membentuk lembaga pengawas dan penyelesaian masalah untuk utang luar negeri, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Untuk mendukung seluruh kebijakannya, Habibie mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut analis *Millenium* penata *Futures*, Suluh Adil Wicaksono, upaya ini cukup berhasil karena Habibie tidak menganut sistem pasar bebas.⁵

Selama 16 bulan beliau menjadi presiden, tidak ada perusahaan yang di privatisasi di Indonesia. Pada era Presiden selanjutnya yaitu KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur IMF kembali menunda bantuan dana kepada Indonesia karena Gus Dur tidak mengikuti kebijakan dari IMF seperti yang dikatakan Rizal Ramli bahwa ketika di pemerintahan Gus Dur keadaan ekonomi minus 3 persen. Setelah itu pemerintah memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan IMF. Selain itu, lanjut Rizal, di era Gus Dur adalah satu-satunya pemerintahan yang berhasil mengurangi indeks kesenjangan ekonomi, tidak melakukan impor beras selama kurun waktu dua tahun dengan tetap menjaga kestabilan harga.⁶

Pada 23 juli 2001 Megawati Soekarno Putri menggantikan Gus Dur sebagai presiden dan setelah sebulan dilantik Megawati mengulang kembali kesepakatan dengan IMF untuk memulai lagi pinjaman sebesar \$5 miliar.⁷ Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, pada periode pemerintahan 2001-2004 pada era pemerintahan Megawati merupakan pemerintahan yang menganut sistem neoliberalisme karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN. Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekira 20 persen dari total nilai BLBI. BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. BUMN yang dijual seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan periode ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai sebesar Rp 3,5 triliun pada tahun 2001, Rp 7,7 triliun pada 2002 dan Rp 7,3 triliun pada tahun 2003.⁸

Harapan rakyat atas terjadinya perubahan ekonomi yang lebih pro-rakyat daripada pro-pasar ada ditangan SBY-Kalla yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi hal tersebut tidak terwujud. Pemilihan tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ternyata di isi oleh orang-orang yang mendukung privatisasi dan menajalankan kebijakan tersebut seperti kebijakan yang telah dibuat oleh para menteri ekonomi yang mengusung prinsip privatisasi yang pada saat itu dijabat oleh Jusuf Anwar dan di gantikan oleh Sri Mulyani ketika mekanisme *reshuffle* kabinet. Setelah itu ada menteri BUMN Sugiharto dan di dukung Aburizal Bakrie sebagai menteri koordinator bidang perekonomian yang melakukan privatisasi dengan dalih untuk memenuhi target pendapatan APBN tahun 2005,

⁵ Yulistyo Pratomo. 2015. "Sepak terjang Habibie mampu turunkan harga dollaar hingga Rp 6.500." *Merdeka*, 26 Agustus. Tersedia Online melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-habibie-mampu-turunkan-harga-dolar-hingga-rp-6500.html>, diakses pada 28 Oktober 2018.

⁶ Idham Anhari. 2017. Rizal Ramli: Satu-satunya pemerintahan yang kurang hutang hanya era Gus Dur . *Rmol*, 30 November. Tersedia Online melalui: <https://politik.rmol.co/read/2017/11/30/316507/Rizal-Ramli:-Satu-satunya-Pemerintahan-Yang-Kurangi-Utang-Hanya-Era-Gus-Dur->, diakses pada 28 Oktober 2018.

⁷ Winda Jusuf. 2017. "Kilas balik Indonesia-IMF selama krisis ekonomi Asia". *Tirto*, 20 Juli. Tersedia Online Melalui: <https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6f>, diakses pada 28 Oktober 2018.

⁸ Muhammad saifullah. 2009. "Privatisasi di era Megawati karena krisis ekonomi". *Okezone*, 30 Mei. Tersedia Online Melalui: <https://news.okezone.com/read/2009/05/30/268/224502/privatisasi-di-era-megawati-karena-krisis-ekonomi>, diakses pada 28 Oktober 2018.

meskipun kebijakan privatisasi ini mendapat tantangan yang keras dari Wakil Presiden Yusuf Kalla.⁹

Pergantian KIB jilid satu dan dua yang dilakukan Presiden SBY-Kalla ternyata tidak mampu menggeser ekonomi neoliberal yang cenderung lebih Pro-pasar dari pada Pro-Rakyat. Tidak mengherankan, jika kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh SBY-Kalla sejak awal pemerintahannya justru menunjukkan semua kebijakan ekonomi dari *Washington Consensus*. Hal ini terlihat dari penggunaan instrumen kebijakan ekonomi yang menganut paham Neoliberal seperti deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan penghapusan subsidi. Liberalisasi dilakukan secara konsisten hampir di semua sektor perekonomian Indonesia.¹⁰

Dilihat dari kekuatan politik yang ada dalam kabinet SBY-Kalla, komposisi kabinet yang terbentuk ini sangat kuat dan mengarah pada preferensi kebijakan Neoliberal dengan disahkannya UU penanaman modal pada maret 2007.¹¹ SBY oleh para aktivis ormas petani dan *nongovernment organizations* (NGOs) dikenal sebagai seorang pemimpin politik yang cenderung suka bekerjasama dengan kekuatan kapitalisme global dan tidak memiliki ikatan-ikatan yang kuat dengan mereka.¹² Privatisasi di jaman SBY amat masif, dan tentunya akan memperlemah struktur kekayaan negara karena privatisasi ini disertai dengan sistem politik neoliberal dimana pemodal masuk dan menguasai seluruh kekayaan negara sementara negara sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pemodal-pemodal asing. Ketiga hal ini bisa menjelaskan kenapa SBY membenarkan politik utang dan politik liberalisasi.¹³

Pada periode tahun 1991-2001, pemerintah Indonesia telah 14 kali memprivatisasi BUMN, namun yang berhasil diprivatisasi ada 11 BUMN. Sementara di pemerintahan SBY, dalam setahun terdapat 44 BUMN yang langsung dijual kepada pihak asing. Dengan agresifitasnya dalam mengobrol BUMN, privatisasi hanya menjadi mekanisme transfer kekayaan dari tangan publik kepada segelintir swasta, juga sebagai skema penghancuran ekonomi nasional yang potensial oleh negeri-negeri imperialis.¹⁴ Salah satu contoh BUMN yang telah di privatisasi adalah PT Krakatau Steel.

Kebijakan privatisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-kalla dan IMF membuat kekayaan Indonesia dikuasai oleh pihak asing dan oleh sebab itu menyebabkan minimnya kemandirian dari ekonomi Indonesia, dengan sistem ekonomi neoliberal ini membuat bangsa tidak bisa lepas dari hutang luar negeri. Di masa pemerintahannya SBY pun tidak ada solusi untuk menghapus hutang terdahulu yang di emban Indonesia sehingga masyarakat pun turut serta menanggung beban utang yang dibuat oleh pemimpin di negeri ini, selain itu Presiden SBY mendapat julukan 'Bapak Privatisasi' karena kebijakan yang ia lakukan bersama IMF sehingga SBY pun hanya bisa tunduk dan mengikuti instruksi langsung dari IMF. Organisasi tersebut ingin

⁹ Aly Yusuf. 2005. "Evaluasi pemerintahan Sby-Kalla". *Media Neliti*, Juni. Tersedia Online Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/45117-ID-evaluasi-pemerintahan-sby-kalla.pdf>, diakses pada 28 Oktober 2018.

¹⁰ Fahmi Radhi. 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Jakarta: Republika. Hal 8.

¹¹ Ibid, hal 10.

¹² Sunardi Purwaatmoko. 2015. Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan. *Jurnal Insignia*. Hal 69.

¹³ Farid dan Putu Heri. 2014. "Lomba privatisasi BUMN, siapa menang". *Liputanislam*, 4 September. Tersedia Online melalui: <http://liputanislam.com/opini/lomba-privatisasi-bumn-siapa-menang/>, Diakses pada 11 Oktober 2018.

¹⁴ *BerdikariOnline*. 2010."SBY, bapak privatisasi Indonesia". 4 November. Tersedia Online Melalui: <http://www.berdikarionline.com/sby-bapak-privatisasi-indonesia/>, Diakses Pada 14 Oktober 2018.

membuat bangsa ini kembali ke zaman kekuasaan modal oleh kolonial yang dimana hal tersebut sudah dimusnahkan oleh Presiden RI pertama Soekarno. Neoliberal menjadi jalan ekonomi yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY-Kalla ditambah dengan dilagalkan nya undang undang nomer 15 tahun 2007 tentang penanaman modal asing seolah menjadi akses kunci kepada pihak asing untuk menguasai BUMN dan melakukan privatisasi di Indonesia dengan berdasar apa yang sudah di rencanakan IMF dan SBY. Pada tahun 2006 SBY menyatakan bahwa hutang sudah dilunasi kepada IMF dan seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010, SBY beralih bahwa pada saat itu perekonomian di Indonesia membaik dan memutuskan bersama pemerintah dan Bank Indonesia untuk mempercepat pelunasan hutang sekaligus mengurangi biaya penalti utang karena telah mempercepat proses pelunasan hutang ke IMF.¹⁵

Setelah proses pelunasan utang tidak membuat privatisasi di Indonesia berhenti dan masih tetap menutupi utang negara dengan menjual BUMN. Privatisasi tetap dilakukan ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar dan BUMN yang diprivatisasi itu antara lain Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, *Surveyor* Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia. Pada tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri. Tujuh perusahaan dijual dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Cambrics Primmissima, PT Industri Gelas, PT BNI Tbk, Semen Kupang, Semen Baturaja dan privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya.¹⁶

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis dalam meneliti karya ilmiah menggunakan kerangka teori atau konsep neoliberalisme dan hutang luar negeri sebagai salah satu cakupannya yaitu privatisasi yang dipaparkan pertama kali oleh Adam Smith dan dalam bukunya *the wealth of nations* menjelaskan tentang ekonomi pasar liberal dan Privatisasi salah satu bagian terpenting dari neoliberalisme. Selain itu konsep hutang luar negeri digunakan karena SBY mengambil kebijakan privatisasi untuk membayar hutang negara ke IMF.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan pemerintahan SBY terkait privatisasi dan sistem ekonomi yang dianut yaitu neoliberalisme yang telah di intervensi oleh IMF akibat utang yang harus dibayar Indonesia ke IMF sehingga pemerintahan SBY harus mengikuti prasyarat diberikannya bantuan selama periode pemerintahannya yaitu 2004-2009 dan menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan dari penerapan program privatisasi tersebut.

¹⁵ Ghoida Rahmah dan Ali Akhmad Noor Hidayat. 2018. "IMF Ingatkan Pemerintah soal Tekanan Defisit Transaksi Berjalan". *Tempo*, 13 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://bisnis.tempo.co/read/1135771/imf-ingatkan-pemerintah-soal-tekanan-defisit-transaksi-berjalan>, Diakses pada 14 Oktober 2018.

¹⁶ M.Syafi'ie. 2016. "Sistemiknya privatisasi Badan usaha Milik Negara dan Sumber Daya Alam di Indonesia". *Mahkamah*. Volume 1, No 1, 2016. Hal 71-72.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah data dari bahan sekunder dan studi kepustakaan yakni pada tahapan ini peneliti bukan kegiatan yang bersifat *'trial-error'*. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan memenuhi karya tulis.

SBY Melakukan Privatisasi untuk membayar hutang ke IMF

Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK yang kala itu baru terbentuk telah membayar utang kepada IMF sebesar Rp 126,315 triliun dan pada 2005 cicilan utang pokok Rp 61,614 triliun dan bunga Rp 64,691 triliun lebih rendah Rp 17,2 triliun dari yang dianggarkan, karena mendapat penundaan pembayaran utang akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias. Dalam APBN 2006 untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri pemerintah telah mengalokasikan Rp 140,22 triliun (4 kali lebih besar dari pada anggaran pendidikan yang dianggarkan Rp 34 triliun). Rinciannya: pembayaran beban bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan utang pokok Rp 63,59 triliun. Jauh lebih besar daripada *opportunity lost* (selisih antara harga BBM bila dijual di luar negeri dengan harga BBM) yang diubah menjadi subsidi (sekitar Rp 95 triliun). Atas tekanan IMF mesti di kurangi sampai nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Tetapi masalah yang dihadapi adalah belum optimalnya kinerja BUMN, sehingga masih ada potensi membebani fiskal karena kinerja BUMN yang berpengaruh baik disisi pendapatan maupun sisi pengeluaran negara. Selain itu belum terimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* secara utuh diseluruh BUMN. Sejak tahun 2005 hingga semester pertama tahun 2006 pemerintah belum melakukan privatisasi BUMN. Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan tidak terlaksananya privatisasi BUMN adalah:

1. Pemerintah masih berkonsentrasi pada pelaksanaan restrukturisasi melalui peningkatan kinerja perusahaan.
2. Belum adanya persepsi yang sama dari *stakeholders* BUMN mengenai manfaat privatisasi.
3. Menunggu kondisi pasar saham yang baik.¹⁸

Kebijakan SBY yang mengikuti paket kebijakan ekonomi IMF

Setelah membayar utang ke IMF ternyata privatisasi tetap dilakukan pada tahun 2006 pemerintah melakukan penjualan saham Perusahaan Gas Negara (PGN) maksimal 5,31%. Pada tahun itu juga, Presiden SBY mengeluarkan keputusan tentang komite privatisasi perusahaan Perseroan, KEPRES No. 18/2006 yang semakin menguatkan kebijakan privatisasi di Indonesia secara sistemik.¹⁹

Pada tanggal 5 September 2005, pemerintah menetapkan kebijakan privatisasi BUMN melalui penetapan PP No. 33/2005 tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan perlunya menetapkan PP tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi (*political economic*) dan prasyarat diberikannya bantuan oleh IMF suatu negara. Seperti pernyataan bank dunia bahwa keberhasilan privatisasi tidak dapat dilepaskan dari aspek politik ekonomi. Keterlibatan lembaga legislatif serta kesiapan manajemen perusahaan yang bersangkutan akan sangat menentukan keberhasilan privatisasi selain itu untuk menyambut

¹⁷ Ishak Rafick. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*. Jakarta: Ufuk Publishing House. Hal 43-44.

¹⁸ Bappenas. 2006. *Berjuang Membangun Kembali Indonesia*. Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal 48.

¹⁹ M. Danial Nafis. 2009. *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat*. Jakarta: INSIDE Press. hal. 119-120.

hadirnya era global dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN untuk ditingkatkan profesionalitasnya.²⁰

Tabel 1. Beberapa BUMN yang telah di privatisasi oleh SBY-Kalla.

NO.	BUMN	TAHUN DIPRIVATISASI	SEKTOR
1.	PT. Telkom Tbk	2006	Telekomunikasi
2.	PT. Indosat Tbk	2006	Telekomunikasi
3.	PT. PGN Tbk	2006	Gas Bumi
4.	PT. Bank Mandiri Tbk	2006	Perbankan
5.	PT. Bank BRI Tbk	2006	Perbankan
6.	PT. Bank BNI Tbk	2007	Perbankan
7.	PT. Tambang batubara Bukit Asam Tbk	2009	Batu Bara
8.	PT. Antam Tbk	2008	Pertambangan
9.	PT. Adhi Karya Tbk	2008	Konstruksi
10.	PT. Timah Tbk	2006	Pertambangan
11.	PT. Bank Bukopin Tbk	2008	Perbankan
12.	PT. Kimia Farma Tbk	2008	Farmasi
13.	PT. Indofarma Tbk	2008	Farmasi
13.	PT. Jasa Marga	2007	Penyelenggara Jasa jalan Tol
14.	PT. Wijaya Karya	2007	Konstruksi
15.	PT. Merpati	2007	Penerbangan
16.	PT. Industri Soda Indonesia	2007	Kimia
17.	PT. Industri Gelas	2009	Pembuatan Gelas
18.	PT. Krakatau Steel	2008	Produksi Baja
19.	PT. Garuda Indoesia	2008	Penerbangan
20.	PT. BTN	2008	Perbankan
21.	PT. Waskita Karya	2008	Konstruksi
22.	PT. Pembangunan Perumahan	2008	Konstruksi
23.	PT. Bahtera Adiguna	2009	Transportasi
24.	PT. Rukindo	2009	Pengerukan

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

²⁰ Siti Maro'ah. 2008. "Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya dalam Perekonomian Makro Indonesia". *Balanced Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*. Vol. 5. No. 9.

Fakta menunjukkan pada tahun 2008 pemodal asing telah menguasai hampir 85 persen kepemilikan saham BUMN di Indonesia dan lebih dari separuh kepemilikan perbankan, hampir 90 persen dari 137 konsesi pengelolaan lahan migas di Indonesia juga sudah dikuasai oleh korporasi asing, yang menduduki produsen migas di Indonesia 7 dari 10 besar diantaranya adalah:

1. Chevron Pacific (Amerika Serikat)
2. Conoco Philips (Amerika Serikat)
3. Total Indonesia (Prancis)
4. China National Offshore Oil Corporation (Tiongkok)
5. PetroChina (Tiongkok)
6. Korea Development Company (Korea Selatan)
7. Chevron Company (Amerika Serikat).²¹

Pendukung Kebijakan Privatisasi di Kabinet SBY

Privatisasi dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor di kabinet SBY yang berperan agar privatisasi diwujudkan di kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di samping itu menurut pengamat hukum tata negara Saldi Isra menyebutkan bahwa orang-orang yang menduduki komisaris BUMN adalah tim pemenang SBY, sehingga lingkup dari pengelolaan BUMN tersebut direkrut presiden berdasarkan balas jasa ketika pemilu tahun 2004 dan memang hal tersebut pun dibuktikan dengan beberapa nama yang menduduki jabatan komisaris BUMN, seperti Samsuddin yang pada saat itu adalah Sekjen tim kampanye menjadi komisaris Jasa Marga, Umar Said ketua seksi kampanye menjadi komisaris Pertamina, dan Robik Mukav ketua Sie Pengumpulan data yang menjadi dewan pengawas TVRI. Selanjutnya ada Aam Sapulete tim khusus pemenang SBY menjadi Komisaris PTP Lampung, Andi Arif menjabat Komisaris PT Pos, Heri Sebayang menjadi Komisaris PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Sumut, dan Yahya Ombara menjadi komisaris PT KAI.²²

Pihak yang diuntungkan dari Privatisasi

Pihak yang justru diuntungkan dengan privatisasi tersebut adalah investor asing yang membeli saham-saham BUMN yang ditawarkan pada sesi *Initial Public Offering* di lantai bursa. Pihak yang diuntungkan dari privatisasi BUMN tentu saja politisi yang memainkan peran di dalam lingkaran BUMN selain itu ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN, negara juga mendapatkan pemasukan. Andrew Rosser mengidentifikasi beberapa alasan beberapa pihak yang tidak menghendaki penerapan kebijakan privatisasi di Indonesia. Pertama, privatisasi menimbulkan ancaman serius bagi para birokrat politisi yang ada di dalam pengelolaan BUMN karena ada kemungkinan mereka akan digantikan oleh manajer profesional ketika BUMN diprivatisasi. Kedua, hanya sedikit dari masyarakat Indonesia yang mendukung program privatisasi. Pemahaman masyarakat bahwa *private sector* di Indonesia telah mengalami kebangkrutan dan konsekuensinya *private sector* domestik tersebut tidak memiliki ekuitas untuk membeli saham BUMN.²³

Pihak yang diuntungkan dari dijualnya Indosat misalkan, menyebabkan pemerintah kehilangan sumber pemasukan. Kecilnya kepemilikan saham pemerintah hanya sekitar 15% di Indosat, maka potensi pendapatan pemerintah dari Indosat semakin kecil. Selain itu, pajak dari kepemilikan Singapore Technologies Teleme did Pte. Ltd (STT) di Indosat tidak dapat dikenakan, karena STT membeli saham Indosat atas nama Indonesian Communications Limited (ICL) sebuah perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di negara Mauritius (negara yang tidak mengenakan pajak). Dengan berpusat di Mauritius, ICL dapat menghindari dari ketentuan pajak sehingga STT

²¹ Fahmi Radhi, Op.Cit.,Hal 6.

²² Detiknews. 2009. "Sarat kepentingan penguasa, pengelolaan BUMN tidak efisien". 22 Juni. Tersedia Online melalui: <https://news.detik.com/advertorial-news-block/1152294/sarat-kepentingan-penguasa-pengelolaan-bumn-tak-efisien>, diakses 12 Februari 2019.

²³ Kukuh Fadli Prasetyo. 2012. "Politik Hukum di Bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi welfare state di dalam undang-undang dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. No. 3. Hal 508-509.

mendapatkan keuntungan yang besar. Status Indosat berganti menjadi PMA yang berarti segala sarana dan prasarana infrastruktur PT Indosat termasuk anak-anak perusahaan telah dimiliki asing. Jatuhnya sebagian kepemilikan Indosat ke tangan STT maka Indosat berada di bawah kontrol pemerintah Singapura, karena STT yang telah menguasai 41,9% saham Indosat dan Singapore Telecommunication yang menguasai 35% saham Telkomsel keduanya merupakan badan usaha milik pemerintah Singapura.²⁴

Kesimpulan

Kebijakan privatisasi telah dilakukan sejak era Soeharto begitu juga pada pemerintahan di awal reformasi, meski demikian akan tetapi di era SBY privatisasi dilakukan secara besar-besaran dengan dukungan oleh para politisi di kabinetnya. Pada dasarnya privatisasi merupakan salah satu kunci dari sistem ekonomi globalisasi dan dari kebijakan privatisasi tersebut meliputi komersialisasi atas layanan publik, eksploitasi sumber daya alam yang seharusnya milik negara seperti air, udara dan keanekaragaman hayati tetapi hal tersebut justru dijual kepada asing. Selain itu fakta menunjukkan bahwa pemodal asing telah menguasai hampir 85 persen kepemilikan saham BUMN di Indonesia dan lebih dari separuh kepemilikan perbankan, hampir 90 persen dari 137 konsesi pengelolaan lahan migas di Indonesia juga sudah dikuasai oleh korporasi asing. Dalam skripsi ini telah menjelaskan berbagai hal yang disimpulkan sebagai berikut.

Privatisasi dilakukan secara masif pada era SBY dengan menjual puluhan BUMN kepada asing maupun swasta sehingga dampaknya adalah privatisasi merugikan bagi masyarakat secara luas sehingga hal ini penting untuk diteliti. Kebijakan privatisasi sejatinya sudah dilakukan sebelum pemerintahan SBY seperti pemerintahan Soeharto yang melakukan kerjasama dengan perusahaan Freeport sehingga perusahaan tersebut dapat masuk ke Indonesia dengan melakukan privatisasi dan mengeksploitasi alam di Papua dilanjutkan dengan perjanjian kontrak karya bersama Soeharto dengan disahkannya undang-undang no. 1 tahun 1967 yang memberikan izin kepada Freeport untuk mendirikan perusahaannya selama 30 tahun. Privatisasi di era Soeharto ini lebih condong kepada privatisasi di sektor Gas bumi dan pengilangan minyak.

Namun ketika pemerintahan di era Habibie, privatisasi tidak dilakukan karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi Indonesia pada saat itu lebih difokuskan kepada penyelamatan rupiah dengan Habibie mengesahkan undang-undang anti monopoli dan pada pemerintahan Habibie ini pula IMF mampu mengintervensi dan memiliki peran atas kebijakan ekonomi di Indonesia, karena pada saat itu Habibie melakukan utang kepada IMF dan Bank Dunia maka segala peraturan terkait ekonomi dibawah bimbingan IMF. Di lain pihak pemerintahan Gus Dur tidak masif untuk melakukan privatisasi, walaupun hanya beberapa BUMN saja yang di privatisasi tetapi tetap saja Gus Dur melibatkan asing untuk peningkatan ekonomi di Indonesia yang mengutamakan diplomasi ekonomi dengan sering mengunjungi negara-negara di sekitar Asean ataupun Eropa untuk mengundang investor menanamkan modalnya ke Indonesia.

Tetapi privatisasi justru masif dilakukan di era Megawati dengan menjual 7 BUMN pada awal pemerintahannya kepada asing, selain itu Megawati juga menjual BUMN yang dinilai strategis serta menguntungkan Indonesia dan yang paling di sorot pada saat itu yaitu PT. Indosat yang dijual kepada Singapura atas saran dari IMF karena pada saat itu IMF berperan untuk mengintervensi kebijakan ekonomi karena setelah Megawati melakukan perjanjian dengan IMF maka dari itu segala kebijakan ekonomi yang direkomendasikan IMF pun diterapkan seperti paham ekonomi liberal yang meliputi deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi selain itu pemerintahan Megawati beralasan melakukan privatisasi karena tujuan penyelamatan ekonomi.

Pada pemerintahan selanjutnya SBY-Kalla kembali melakukan privatisasi untuk membayar hutang negara terhadap IMF dan mengikuti semua prasyarat bantuan yang diberikan seperti yang sudah dijelaskan di skripsi ini telah memaparkan tentang kebijakan Sby-Kalla yaitu sebagai berikut:

²⁴ Harun dan Dewi Bangun k. 2006. "Divestasi Indosat: Analisis krisis hukum Islam". *Suhuf*. Volume 18. No. 1. Hal 73.

Pertama; pada awal pemerintahannya SBY melakukan kebijakan dengan mensubsidi bahan bakar minyak atau dengan kata lain menaikkan bahan bakar minyak dan secara bersamaan SBY telah melunasi utang Indonesia ke IMF tetapi walaupun utang tersebut sudah dilunasi SBY tetap menerapkan paket kebijakan dari IMF yaitu melakukan privatisasi yang merupakan bagian dari sistem ekonomi neoliberal. Kebijakan kedua; SBY mengesahkan undang-undang tentang privatisasi, membuat komite privatisasi, dan undang-undang tentang penanaman modal asing yang membuat privatisasi semakin gencar dilakukan dan akibatnya privatisasi dapat dilakukan secara sistemik. Ketiga; selama era SBY privatisasi banyak dilakukan kepada puluhan BUMN. Kebijakan SBY selanjutnya adalah membuat UKP3R, yaitu unit kerja bentukan presiden yang diberi tugas selama sisa pemerintahan SBY untuk meningkatkan kinerja BUMN namun konsultan dari unit ini justru berasal dari asing yang turut mengawasi BUMN di Indonesia setelah IMF tidak bisa lagi terlibat di kebijakan ekonomi Indonesia setelah utang dilunasi.

Kebijakan privatisasi SBY ini didukung oleh para politisi yang memegang jabatan di kabinetnya. Selain itu orang-orang di kabinet SBY ini diisi oleh pihak yang mendukung privatisasi, menteri BUMN pada saat itu berpendapat jika dilakukan privatisasi maka utang Indonesia ke IMF bisa lunas, namun dengan utang yang telah dilunasi justru tidak membuat pemerintah menghentikan privatisasi. Terkait undang-undang tentang penanaman modal asing menjadikan pemodal asing tidak lagi dibatasi sehingga perpanjangan kontrak dengan perusahaan asing yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia bisa lebih lama. Selain itu ketika BUMN tersebut telah di privatisasi, SBY mengeluarkan kebijakan agar BUMN yang telah di privatisasi itu di beli kembali guna mengembalikan kepercayaan masyarakat karena terlalu banyak BUMN yang telah di privatisasi.

Kebijakan privatisasi di era SBY ini menjadi program tahunan yang dilakukan selama pemerintahannya dengan melibatkan menteri BUMN, menteri keuangan, dan DPR untuk memproses perusahaan yang akan di privatisasi atas rekomendasi dari menteri keuangan dengan dalih agar ekonomi semakin berkembang dan privatisasi menjadi cara agar defisit APBN bisa diatasi dengan melakukan penjualan atau memprivatisasi suatu BUMN. Selanjutnya pemerintahan SBY menerapkan kebijakan yang merugikan negara demi menarik investor asing agar tertarik ke Indonesia yaitu dengan mengurangi pajak kepada perusahaan multinasional dan dengan di terapkannya kebijakan tersebut maka pendapatan negara pun ikut merosot, dari kerugian tersebut SBY justru menaikkan pajak agar menutupi APBN.

Dengan banyaknya melakukan privatisasi BUMN pemerintah SBY mempunyai alasan untuk menerapkan program privatisasi tersebut yaitu pemerintah menilai jika BUMN dialihkan kepada swasta atau asing maka akan ada daya bersaing yang sama antara BUMN dan swasta. Selain itu dengan pengalihan BUMN ke swasta maka tidak akan ada ketimpangan antara BUMN dan swasta dalam mengelola industri di Indonesia dan jika pemerintah menjual aset BUMN ke swasta dalam negeri akan timbul sinergi antara BUMN dan pengusaha swasta di dalam negeri. Di samping itu BUMN tidak bisa melaksanakan proyek sendiri tanpa adanya bantuan, maka dari itu swasta dilibatkan agar membantu BUMN mengerjakan proyek atau pelaksanaan industri yang tidak bisa BUMN kerjakan.

Pemerintah juga menilai jika BUMN yang dimiliki negara dapat bekerja sama dengan swasta maka peran pemerintah ketika mengatur pengelolaan anggaran BUMN dapat berkurang, dalam hal membantu teknologi baru yang sudah digunakan oleh pihak swasta dalam mengelola industri atau suatu badan usaha. Jadi, dengan kerjasama tersebut BUMN maupun swasta diharapkan dapat saling transfer teknologi yang efisien dan pemerintah menganggap dengan mengalihkan kepemilikan BUMN ke swasta maka pemerintah tidak harus terus mengelola BUMN dalam hal anggaran dan swasta dalam hal ini diperlukan agar pemerintah dapat mensubsidi pendanaan tersebut ke sektor lain sehingga pemerintah mampu memberikan anggaran secara merata di semua sektor dengan tidak terpaku kepada BUMN saja.

Selanjutnya pemerintah menilai privatisasi harus dilakukan dengan menjual saham BUMN ke publik agar masyarakat mampu merasakan hasil dari keuntungan sebuah BUMN selain itu karena pemerintah menilai agar BUMN mandiri untuk mencari pendanaan dan tidak selalu tergantung

kepada pemerintah sehingga BUMN dapat bersaing di pasar nasional maupun pasar internasional. Penjualan saham ke publik pun dinilai dapat meningkatkan target dividen kepada negara sekaligus dapat menyehatkan BUMN, di samping itu pemerintah menilai ketika BUMN sudah terdaftar di bursa maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya sehingga dari situ ada kontrol penuh publik untuk mengawasi BUMN yang telah di privatisasi. Selain itu ketika BUMN sudah di bursa maka pemerintah menyebutkan bahwa asing maupun pengusaha swasta dapat meningkatkan kesejahteraan BUMN.

Pemerintah menganggap privatisasi sebagai program yang dapat membantu menangani defisit APBN selain itu pemerintah pun menyebutkan bahwa swasta justru menyumbang lebih banyak ke negara dibandingkan BUMN dan dari situ peran swasta sangat diperlukan. Ketika privatisasi dilakukan, di sisi lain pemerintah akan mendapatkan dana segar untuk penambahan modal BUMN yang di privatisasi, pengembangan usaha ataupun keperluan investasi lainnya serta sisanya bisa dibelanjakan sesuai keperluan publik. Pemerintah tidak perlu lagi untuk menaikkan pajak karena harus menambal defisit APBN dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah beranggapan bahwa program privatisasi adalah kebijakan yang tepat yang harus diterapkan oleh pemerintah demi penyehatan BUMN dan demi perekonomian negara.

Setelah pemerintah melakukan privatisasi justru pihak diuntungkan dari privatisasi hanya pihak-pihak tertentu dan bukan kepada masyarakat luas, pihak yang diuntungkan dari privatisasi tersebut adalah para politisi yang memegang jabatan di lingkungan BUMN dan keuntungan yang didapat pun hanya di kalangan pengusaha dan orang-orang yang terlibat ketika privatisasi itu dilakukan. Selain itu ketika asing telah membeli saham atau kepemilikan saham secara mayoritas tentu saja dengan begitu mereka mengantongi banyak keuntungan dari privatisasi. Asing yang telah mempunyai saham mayoritas di perusahaan BUMN, mereka hanya mengawasi saja perusahaan tersebut dari negara asal mereka dan mendirikan perusahaan tersebut di negara yang bebas pajak. Sehingga segala aspek tentang perusahaan tersebut baik sarana ataupun prasarananya dapat dengan mudah sepenuhnya dikuasai atau di kelola oleh asing.

Privatisasi hanya bermanfaat bagi pelaku privatisasi saja sedangkan masyarakat dirugikan dengan adanya privatisasi seperti lahan yang harus di jual ke pemerintah asing, adanya kesenjangan antara pemilik usaha yang dibantu oleh swasta dan pelaku industri kecil yang independen tanpa ada bantuan dari pemerintah. BUMN yang dikelola asing maupun swasta mendapatkan suntikan modal yang besar, sedangkan BUMN yang mengalami kebangkrutan terpaksa harus dijual ke swasta dan dikelola oleh swasta yang mengakibatkan jumlah pengangguran menjadi bertambah karena besarnya pemecatan dari BUMN yang bangkrut. Selain itu ketika sebuah BUMN atau pelayanan publik di sudah privatisasi dan di ambil alih oleh swasta maupun asing, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun menurun karena biaya yang di bebankan kepada masyarakat terlalu mahal. Selain itu dengan penerapan privatisasi di kebijakan ekonomi SBY membuktikan bahwa sistem ekonomi yang diterapkannya cenderung beraliran neoliberal.

Privatisasi tidak menguntungkan bagi masyarakat secara umum, pengetahuan masyarakat tentang privatisasi pun demikian minim sehingga ketika pemerintah menyebutkan alasan untuk memprivatisasi adalah agar masyarakat bisa menikmati hasil dari keuntungan BUMN yang faktanya hal tersebut keliru sebab masyarakat bahkan yang dapat menikmati keuntungan dari BUMN hanya dari golongan politisi, swasta dan orang-orang disekitar SBY saja. Secara tidak langsung privatisasi tidak ditujukan untuk masyarakat secara luas karena daya saing masyarakat yang lemah ketika sebuah BUMN telah dikuasai oleh asing, hal itu mengakibatkan ekonomi Indonesia tidak bisa mandiri karena terus melibatkan asing dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian skripsi ini dibuat berdasarkan dari penelitian ilmiah dan data yang bersumber dari jurnal, buku, ataupun website berita terkait kebijakan privatisasi pada periode SBY-Kalla.

DAFTAR PUSTAKA

- Okezone. 2018. "Boediono Mengenang Krisis Ekonomi 1998: Kita Paling parah Saat Itu." 28 Maret. Tersedia Online Melalui: <https://economy.okezone.com/read/2018/03/28/20/1879132/boediono-mengenang-krisis-ekonomi-1998-kita-paling-parah-saat-itu>, diakses 21 Oktober 2018.
- Baswir, Revrison, dan Deddy Heriyanto, eds, 2003. *Terjajah Di Negeri Sendiri*. Jakarta: Elsam.
- Khadijah, Siti. 2014. "IMF Dalam Perspektif Teori Dependensi dan Perubahan Sosial". *Jurnal Makna*. Vol 4.No. 1.
- Lavinda. 2018. "Memorabilia IMF dari era Soeharto hingga Jokowi." *CNN Indonesia*, 5 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181001180924-532-334733/memorabilia-imf-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>, diakses 28 Oktober 2018.
- Pratomo, Yulistyo. 2015. "Sepak terjang Habibie mampu turunkan harga dollaar hingga Rp 6.500." *Merdeka*, 26 Agustus. Tersedia Online melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-habibie-mampu-turunkan-harga-dolar-hingga-rp-6500.html>, diakses pada 28 Oktober 2018.
- Anhari, Idham. 2017. Rizal Ramli: Satu-satunya pemerintahan yang kurangi hutang hanya era Gus Dur. *Rmol*, 30 November. Tersedia Online melalui: <https://politik.rmol.co/read/2017/11/30/316507/Rizal-Ramli:-Satu-satunya-Pemerintahan-Yang-Kurangi-Utang-Hanya-Era-Gus-Dur->, diakses pada 28 Oktober 2018.
- Jusuf, Winda. 2017. "Kilas balik Indonesia-IMF selama krisis ekonomi Asia". *Tirto*, 20 Juli. Tersedia Online Melalui: <https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6f>, diakses pada 28 Oktober 2018.
- Saifullah, Muhammad. 2009. "Privatisasi di era Megawati karena krisis ekonomi". *Okezone*, 30 Mei. Tersedia Online Melalui: <https://news.okezone.com/read/2009/05/30/268/224502/privatisasi-di-era-megawati-karena-krisis-ekonomi>, diakses pada 28 Oktober 2018.
- Yusuf, Aly. 2005. "Evaluasi pemerintahan Sby-Kalla". *Media Neliti*, Juni. Tersedia Online Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/45117-ID-evaluasi-pemerintahan-sby-kalla.pdf>, diakses pada 28 Oktober 2018.
- Radhi, Fahmi. 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Jakarta: Republika.
- Purwaatmoko, Sunardi. 2015. Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan. *Jurnal Insignia*. Hal 69.
- Farid dan Putu Heri. 2014. "Lomba privatisasi BUMN, siapa menang". *Liputanislam*, 4 September. Tersedia Online melalui: <http://liputanislam.com/opini/lomba-privatisasi-bumn-siapa-menang/>. Diakses pada 11 Oktober 2018.
- BerdikariOnline*. 2010. "SBY, bapak privatisasi Indonesia". 4 November. Tersedia Online Melalui: <http://www.berdikarionline.com/sby-bapak-privatisasi-indonesia/>, Diakses Pada 14 Oktober 2018.
- Rahmah, Ghoida dan Ali Akhmad Noor Hidayat. 2018. "IMF Ingatkan Pemerintah soal Tekanan Defisit Transaksi Berjalan". *Tempo*, 13 Oktober. Tersedia Online Melalui:

<https://bisnis.tempo.co/read/1135771/imf-ingatkan-pemerintah-soal-tekanan-defisit-transaksi-berjalan>, Diakses pada 14 Oktober 2018.

Syafi'ie, M. 2016. "Sistemiknya privatisasi Badan usaha Milik Negara dan Sumber Daya Alam di Indonesia". *Mahkamah*. Volume 1, No 1, 2016.

Rafick, Ishak. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*. Jakarta: Ufuk Publishing House.

Bappenas. 2006. *Berjuang Membangun Kembali Indonesia*". Jakarta: Kemenrtian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Nafis, M. Danial. 2009. *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat*". Jakarta: INSIDe Press.

Maro'ah, Siti. 2008. "Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya dalam Perekonomian Makro Indonesia". *Balanced Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*. Vol. 5. No. 9.

Detiknews. 2009. "Sarat kepentingan penguasa, pengelolaan BUMN tidak efisien". 22 Juni. Tersedia Online melalui: <https://news.detik.com/advertorial-news-block/1152294/sarat-kepentingan-penguasa-pengelolaan-bumn-tak-efisien>, diakses 12 Februari 2019.

Prasetyo, Kukuh Fadli. 2012. "Politik Hukum di Bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi welfare state di dalam undang-undang dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. No. 3.

K Dewi Bangun dan Harun. 2006. "Divestasi Indosat: Analisis krisis hukum Islam". *Suhuf*. Volume 18. No. 1.